

## **Peran Pemerintah Dalam Proses Perkembangan *Community-Based Tourism* (CBT) (Kasus: Wisata Bahari Pantai Gope, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Banten)**

### ***The Role of the Banten District Government in the Process of Community-Based Tourism (CBT) Development (Case: Gope Beach Marine Tourism, Banten Village, Kasemen District, Banten)***

Khansa Auliyyaa Devanka, Saharuddin<sup>\*</sup>, Ghilandy Ramadhan

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

<sup>\*</sup>E-mail korespondensi: [saharuddin@apps.ipb.ac.id](mailto:saharuddin@apps.ipb.ac.id)

Diterima: 01 November 2025 | Direvisi: 27 Desember 2025 | Disetujui: 30 Desember 2025 | Publikasi Online: 30 Desember 2025

#### **ABSTRACT**

Banten has a variety of interesting tourist attractions, one of which is located at Gope Beach, Karangantu. The government has an important and influential role in the development of community-based tourism. This study examines the relationship between the degree of government role and the level of CBT development in Gope Beach marine tourism. The method used in this study are quantitative approach supported by qualitative data. This study used a purposive sampling technique with 40 respondent, tourist fishermen and traders, and 6 informants as qualitative subjects. The results showed that there was no relations between the degree of government role and the level of CBT development in Gope Beach marine tourism. But, there is a relations between the degree of government role and the level of CBT development in Gope Beach marine tourism in case of tourist fishermen community. This is due to the low degree of government role in Gope Beach marine tourism, but since Gope Beach Marine Tourism is under the jurisdiction of Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the government related to it pay attention to the tourist fishermen community.

**Keywords:** community-based tourism, government role, marine tourism

#### **ABSTRAK**

Banten memiliki berbagai objek wisata yang menarik, salah satunya yang terletak di Pantai Gope, Karangantu. Pemerintah memiliki peran penting dan berpengaruh dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini mengkaji hubungan antara derajat peran pemerintah dengan tingkat pengembangan CBT di wisata bahari Pantai Gope. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan 40 responden, nelayan wisata dan pedagang, dan 6 informan sebagai subjek kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara derajat peran pemerintah dengan tingkat pengembangan CBT di wisata bahari Pantai Gope. Namun, ada hubungan antara derajat peran pemerintah dengan tingkat pengembangan CBT di wisata bahari Pantai Gope pada kasus komunitas nelayan wisata. Hal ini disebabkan karena derajat peran pemerintah yang rendah di wisata bahari Pantai Gope, tetapi karena wisata bahari Pantai Gope berada di bawah yurisdiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka pemerintah terkait memberikan perhatian kepada komunitas nelayan wisata.

**Kata kunci:** komunitas berbasis turisme, peran pemerintah, wisata bahari

## PENDAHULUAN

Sebagai negara agro-maritim, dengan jumlah pulau yang mencapai 17.001 pulau (BPS 2024) serta kekayaan budaya, alam, dan sumber daya manusia yang beragam, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Potensi pariwisata yang besar ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik mengenai peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2024), kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia mencapai 1,14 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 22,91 persen dibandingkan November 2023 (month-to-month) dan naik 20,17 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu (year-on-year).

Mengenai pengembangan pariwisata, Banten memiliki potensi besar untuk mengembangkan komunitas berbasis pariwisata sebagai salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Pada teorinya, Community-Based Tourism (CBT) merupakan pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang menekankan partisipasi langsung dan tidak langsung masyarakat lokal dalam industri pariwisata (Purnamasari 2011). CBT merupakan pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan manajemen destinasi wisata. Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat lokal dapat merasakan manfaat ekonomi langsung dari pariwisata dan merasa memiliki tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan dan budaya. Salah satu pendekatan yang mulai mendapatkan perhatian adalah Community-Based Tourism (CBT), yang menekankan pada partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan dan manajemen destinasi pariwisata.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan CBT di Banten. Sebagai regulator dan fasilitator utama, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang penting dan berpengaruh dalam perkembangan komunitas berbasis turisme. Berdasarkan Pitana dan Gayatri (2005), pemerintah memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Selain itu, pemerintah memiliki peran dalam pengembangan pariwisata berupa gagasan, dana, energi, keahlian (Aprilani *et al.* 2021).

Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat mencakup penyusunan kebijakan, penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengawasan untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas destinasi wisata. Dukungan pemerintah tersebut berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Community-Based Tourism (CBT) karena mendorong kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola destinasi, mengembangkan produk pariwisata, serta membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan (Pitana & Gayatri, 2005)

Pada salah satu daerah di Banten, tepatnya di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, terdapat kawasan yang sedang dikembangkan sebagai pariwisata berbasis komunitas, yaitu wisata bahari Pantai Gope. Pengembangan Community-Based Tourism (CBT) di wilayah ini menuntut pemahaman yang komprehensif mengenai peran pemerintah daerah. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas (Dewi *et al.*, 2021). Oleh karena itu kajian mengenai peran pemerintah dalam pengembangan CBT di Pantai Gope diharapkan dapat memberikan wawasan empiris dan kebijakan yang relevan bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di daerah lain di Indonesia. (Puspitaningrum & Kuntari, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan Community-Based Tourism (CBT) di Provinsi Banten, dengan studi kasus wisata bahari Pantai Gope di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen. Penelitian ini difokuskan pada peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator, serta pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat lokal dan keberlanjutan pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif (Creswell & Plano Clark, 2018). Penelitian ini dilakukan di wisata bahari Pantai Gope, Karangantu, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten mulai dari bulan Agustus hingga bulan Desember 2024. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi atau konsep *community-based tourism* menurut (Habiba dan Yeasmin 2023), yaitu (i) Partisipasi dan kolaborasi efektif, terdapat pihak lain atau

stakeholder yang terlibat di wisata bahari Pantai Gope; (ii) Wewenang pada masyarakat, terdapat partisipasi masyarakat lokal dalam mengadministrasikan atau mengelola wisata bahari Pantai Gope yang menunjukkan adanya wewenang pada masyarakat wisata bahari Pantai Gope; (iii) Perkembangan masyarakat lokal pada lokasi geografi spesifik, perkembangan pariwisata ini dilakukan di lokasi geografik spesifik yaitu di wisata bahari Pantai Gope, Kota Serang, Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang digunakan untuk mengambil data penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terdapat 40 responden yang dipilih dalam penelitian ini yang merupakan masyarakat yang bekerja di wisata bahari Pantai Gope, yaitu pedagang, 26 responden, dan nelayan wisata bahari, 14 responden. Informan yang dipilih untuk penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan pengembangan wisata bahari Pantai Gope. Data yang diperoleh pada penelitian dengan kuesioner akan diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2019 serta IBM SPSS Statistics 25. Pengujian data menggunakan pengujian *Rank Spearman* dan *crosstable*. Pada penelitian kualitatif data yang diambil berupa data wawancara mendalam serta observasi. Data ini diolah dengan menganalisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian *Rank Spearman* dan *crosstable* digunakan untuk menganalisis hubungan antara derajat peran pemerintah dengan tingkat perkembangan CBT di wisata bahari Pantai Gope, Karangantu, Banten.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Kasemen terletak di bagian utara kota Serang memiliki fokus pengembangan pariwisata, termasuk wisata budaya dan alam, pelabuhan, perdagangan, perumahan, serta fasilitas umum. Di sini, mengalir Sungai Cibanten yang besar dan terkenal, yang bermuara di Karangantu. Kasemen juga dikenal dengan Cagar Budaya Banten Lama, yang merupakan situs ziarah populer, serta Cagar Alam Pulau Dua. Tempat-tempat ini menyimpan banyak peninggalan sejarah dari masa Kesultanan Banten, yang menarik bagi wisatawan, terutama untuk wisata budaya dan bahari. Kondisi alam di sekitar Kecamatan Kasemen yang berbatasan dengan Laut Jawa membuat Kecamatan Kasemen berpotensi dan mendukung dalam aktivitas ekonomi, termasuk perikanan dan pariwisata. Kecamatan Kasemen memiliki potensi sumber daya laut yang kaya. Mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jarak Kecamatan Kasemen dari Kota Serang sekitar 9 km. Wilayah Kecamatan Kasemen Sebagian besar berupa dataran dengan ketinggian rata-rata 500-700 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Kasemen dengan posisi nya yang dekat dengan Kota Serang memiliki banyak penduduk. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2023 Kecamatan Kasemen memiliki jumlah penduduk sebanyak 113.979 jiwa dengan komposisi 58.679 jiwa laki-laki dan

55.300 jiwa Perempuan. Kondisi sosial dan ekonomi di Kecamatan Kasemen berdasarkan data persentase penduduk terhadap tingkat pendidikan tahun 2023, tamat SD mendominasi sebesar 43% sedangkan lulusan tingkat tinggi atau sarjana hanya mencapai 5%. Hal ini dapat disebabkan karena kesenjangan yang ada di Kecamatan Kasemen. Masyarakat yang tidak mampu pun meminjam uang dari bank untuk memenuhi kehidupannya, hingga akhirnya memiliki banyak hutang. Banyak masyarakat tingkat bawah yang terlilit hutang karena pinjaman yang diterima dari bank. Meskipun posisi Kecamatan Kasemen berada di dekat Laut Jawa. Namun, luas lahan sawah di Kecamatan Kasemen masih lebih mendominasi sehingga mayoritas penduduk yang bekerja di Kecamatan Kasemen memiliki jenis pekerjaan sebagai petani. Namun, adanya wisata bahari Pantai Gope membantu masyarakat dalam membuka lowongan kerja baru, seperti pedagang.

### **Sejarah Wisata Bahari Pantai Gope**

Sejarah Pantai Gope sebagai kawasan wisata bahari bermula dari gerakan masyarakat. Kawasan yang saat ini digunakan menjadi lokasi wisata sebenarnya memiliki fungsi utama sebagai pelabuhan perikanan untuk nelayan. Terdapat beberapa cerita yang berbeda mengenai awal mula adanya wisata bahari di Pantai Gope, tetapi semua cerita memiliki poin yang sama yaitu keberadaan wisata bahari di Pantai Gope ini merupakan inisiasi dari masyarakat bukan sesuatu yang direncanakan atau dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, kawasan pelabuhan ini dikenal sebagai Pantai Gope karena harga tiket masuknya yang pada saat itu hanya 500 rupiah (gope). Biaya masuk saat ini untuk setiap kendaraan motor perlu membayar 2000 rupiah. Pihak PPN Karangantu pun mengakui bahwa mereka tidak mendaftarkan Pantai Gope ke Google maps dan terkejut melihat ada nya nama Pantai Gope di *Google maps*.

Pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara pun melihat potensi dari keberadaan wisata bahari ini dan membantu untuk mengembangkan dan memberikan fasilitas yang mendukung seperti mushola, toilet, tempat parkir, dan lainnya. Pemerintah juga menyadari bahwa gerakan dari masyarakat ini mampu menggerakkan pemerintah dalam memberikan keputusan yang tidak ada pada rencana sebelumnya. Sejak awal, pemerintah tidak ada rencana untuk membuat wisata bahari.

### Tingkat Perkembangan CBT

Komunitas yang beraktivitas di wisata bahari Pantai Gope berusaha untuk mengembangkan aspek perkembangan community-based tourism. Penelitian ini berusaha untuk mencari tahu bagaimana community-based tourism memengaruhi dimensi-dimensi yang ada. Tabel 1 menggambarkan jawaban dari responden mengenai keberadaan wisata bahari Pantai Gope membantu dalam mengembangkan aspek dari lima dimensi yang diukur, yaitu dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik. Pengukuran dihitung berdasarkan tidak membantu, cukup membantu, membantu, dan sangat membantu.

**Tabel 1.** Jumlah dan persentase responden mengenai tingkat perkembangan CBT

Konsep	Jawaban Responden	Jumlah (n)	Percentase (%)
Ekonomi	Rendah	11	27.5
	Sedang	22	55
	Tinggi	7	17.5
Sosial	Rendah	4	10
	Sedang	26	65
	Tinggi	10	25
Budaya	Rendah	8	20
	Sedang	24	60
	Tinggi	8	20
Lingkungan	Rendah	0	0
	Sedang	31	77.5
	Tinggi	9	22.5
Politik	Rendah	15	37.5
	Sedang	23	57.5
	Tinggi	2	5
Total	Rendah	2	5
	Sedang	30	75
	Tinggi	8	20

Berdasarkan hasil penelitian secara kuantitatif yang disajikan pada tabel 1, aspek perkembangan *community-based tourism* di wisata bahari Pantai Gope memiliki tingkat sedang dengan presentase 75% dan tingkat tinggi sebesar 20%. Hal ini menunjukkan *community-based tourism* di wisata bahari Pantai Gope cukup berkembang pada dimensi-dimensi yang diteliti dengan dimensi lingkungan sebagai dimensi yang memiliki nilai paling tinggi yaitu tidak ada nilai rendah dan dominasi nilai sedang dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya. Dimensi lingkungan memiliki nilai rata-rata sebesar 29,6. Sedangkan, dimensi dengan nilai yang terendah, yaitu dimensi politik dengan nilai rendah paling banyak dibandingkan dengan dimensi lainnya. Dimensi politik memiliki nilai rata-rata sebesar 22,3. Dimensi yang berada di posisi kedua, ketiga, dan keempat secara berturut-turut, yaitu dimensi sosial dengan nilai rata-rata 28,6, dimensi budaya dengan nilai rata-rata 26,6, serta dimensi ekonomi dengan nilai rata-rata 25,3.

Pada perkembangan suatu daerah, salah satu hal yang diantisipasi oleh masyarakat yaitu perkembangan pada dimensi ekonomi. Apabila terdapat peningkatan dari segi ekonomi maka perkembangan tersebut membawa *profit* pada komunitas atau masyarakat lokal. Keberadaan wisata bahari pantai Gope yang semula tidak ada, menjadi ada membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi mereka. Wisata bahari Pantai Gope membantu dalam meningkatkan lowongan kerja bagi masyarakat sekitar, seperti pedagang dan jasa perahu wisata. Komunitas dan masyarakat yang berjualan atau berbisnis wisata di Pantai Gope merasakan keuntungan bantuan pemasukan dari adanya wisata bahari Pantai Gope, seperti selain menjadi nelayan wisata ada yang menjadi nelayan dan pengusaha juga, selain menjadi pedagang ada yang menjadi paranormal juga. Bahkan berjualan di Pantai Gope ini menjadi sumber pendapatan

utama bagi beberapa penjual. Meskipun begitu jumlah wisatawan yang datang berkunjung terus menurun setiap tahunnya.

*“...Tapi jumlah pengunjungnya mah sedikit, neng. Ramanya cuma sabtu- minggu aja. Biasanya mah rame banget tapi liat sekarang, pengunjungnya belum ada. Ya, mungkin nantilah agak sorean. Tapi biasanya rame mah sabtu-minggu...”* (SH 45 Tahun, Pedagang)

Banyaknya pengunjung yang datang juga mendorong banyaknya pedagang dan nelayan wisata yang berbisnis di wisata bahari Pantai Gope. Oleh karena itu, interaksi antara pedagang dan pedagang, nelayan dan nelayan, pedagang dan nelayan, serta pedagang-nelayan dengan pengunjung pun meningkat. Masyarakat saling berinteraksi satu dengan yang lain dan membantu dalam meningkatkan kualitas hidup.

*“...Ohh, kalau itu mah pasti. Interaksi pasti meningkat. Ini aja sedang kumpul...”* (E 41 Tahun, Nelayan Wisata)

Meskipun begitu mengenai kekuatan komunitas jawaban responden bervariasi. Ada yang merasa antar komunitas kurang tertib, ada yang merasa antar komunitas saling membantu.

*“...Kadang ada masalah mengenai rebutan penumpang. Saya rasa masih kurang tertib...”* (R 28 Tahun, Nelayan Wisata)

Hingga saat ini masyarakat yang tinggal di sekitar wisata bahari Pantai Gope masih menjaga budaya mereka yaitu pesta laut. Pesta laut merupakan budaya perayaan dalam bentuk menunjukkan rasa syukur terhadap hasil panen laut yang diterima dengan mengapungkan kepala kerbau di laut. Perayaan budaya pesta laut ini juga menarik perhatian masyarakat dan wisatawan lain, sehingga keberadaan wisata bahari Pantai Gope masih terjaga. Masyarakat pun berusaha untuk menjaga budaya dengan membuat pertunjukan budaya yang diorganisasikan oleh mereka sendiri, salah satunya yaitu pertunjukan silat.

*“...Setiap tahun ada pesta laut, biasanya ada lomba hias perahu, naoren, seserahan, buang kepala kerbau ke laut...”* (P 35 Tahun, Nelayan Wisata).

*“...Saya dan temen saya waktu itu bikin pertunjukkan silat...”* (R 30 Tahun, Pedagang)

Tidak kalah dengan dimensi lainnya, dari segi dimensi lingkungan keberadaan wisata bahari Pantai Gope ini juga mempengaruhi kebersihan di sekitar lingkungan wisata bahari Pantai Gope. Kebersihan di lakukan untuk kenyamanan dalam berwisata untuk wisatawan, selain itu pantai yang bersih merupakan hal yang penting untuk nelayan dan penyedia jasa wisata bahari. Apabila laut kotor maka akan mengganggu geraknya perahu di laut serta merusak ekosistem dan pemandangan di laut. Kedai dan fasilitas umum pun dibentuk agar tempat berjualan menjadi lebih rapih.

*“...Pastilah! Kalau lautnya kotor nanti sampahnya bisa nyangkut di motor kapal. Terus kalau di darat kotor nanti pengunjung juga ga nyaman.”* (L 35 Tahun, Nelayan Wisata)

Komunitas pedagang dan nelayan pun aktif dalam konservasi lingkungan. Apabila ada kegiatan menanam pohon *mangrove* banyak responden yang antusias untuk ikut. Penanaman pohon *mangrove* juga membantu dalam mencegah abrasi pantai. Meskipun tidak semua responden mengikuti kegiatan menanam pohon *mangrove*, responden merasa dengan adanya wisata bahari Pantai Gope membantu dalam menjaga konservasi lingkungan. Meskipun begitu komunitas dan masyarakat lokal tidak dapat sembarangan menanam tanaman tanpa izin Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu mengingat lahan tersebut di bawah kepemilikan PPN Karangantu

Meskipun begitu, dari segi politik tidak ada pengaruh yang signifikan yang dirasakan komunitas di wisata bahari Pantai Gope. Pemerintah sekitar melakukan pertemuan dengan komunitas di wisata bahari Pantai Gope minimal setiap tahunnya. Namun, dalam segi menyambungkan dengan pihak lain, membantu dengan kerja sama dengan lain, serta dalam mengembangkan wisata bahari Pantai Gope dengan pihak luar masih minim. Pelatihan yang dilakukan oleh komunitas nelayan lebih mengenai keselamatan dalam berlaut, serta untuk pedagang hanya beberapa yang mendapat pelatihan mengenai pengembangan *skills* seperti membuat hiasan rumah dari kerang atau kerajinan tangan dari botol atau sampah plastik. Meskipun begitu, saat ini terbilang bahwa pelatihan sudah jarang terjadi.

*“...Peran pemerintah sebenarnya kurang aktif, selain bantuan dari dinas sosial. Namun apabila dari meresmikan walikota pun meresmikan, tetapi tidak aktif dalam membantu*

*mengembangkan. Pelatihan yang diberikan pun tentang keselamatan... ”* (J 56 Tahun, Nelayan Wisata)

Komunitas dan masyarakat lokal pun sudah mengetahui bahwa lahan yang digunakan merupakan lahan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, sehingga mereka tidak melakukan banyak perubahan apabila tidak ada izin. Kegiatan yang dilakukan memerlukan izin terlebih dahulu, selain itu pihak pemerintah yang lain pun tidak dapat turun tangan karena lahan yang ditempati bukan lahan pemerintah daerah tapi lahan PPN Karangantu. Wisata bahari Pantai Gope pun bukan kegiatan yang ada di bawah PPN Karangantu, melainkan kegiatan yang berawal dari masyarakat dan dibiarkan untuk membantu pemasukan masyarakat. Namun untuk pekembangannya belum dijadikan fokus dari program PPN Karangantu. Meskipun begitu, melihat perkembangannya saat ini PPN Karangantu saat ini berusaha untuk memindahkan lokasi wisata ke tempat lain bekerja sama dengan pihak pemerintah yang lain agar tidak mengganggu lalu lintas nelayan perikanan ke pelabuhan di perairan.

### **Derajat Peran Pemerintah**

Berdasarkan Pitana dan Gayatri (2005) dalam Adi *et al.* (2017), terdapat tiga jenis peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata, yaitu peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Ketiga peran pemerintah tersebut tidak terkecuali perlu ada dan diimplementasikan dalam perkembangan *community-based tourism* di wisata bahari Pantai Gope. Implementasi peran pemerintah tersebut dalam perkembangan *community-based tourism* di wisata bahari Pantai Gope dianalisis dalam penelitian ini secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian mengenai peran pemerintah di wisata bahari Pantai Gope secara kuantitatif disajikan pada tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2** Jumlah dan persentase responden mengenai derajat peran pemerintah

<b>Konsep</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Motivator	Rendah	22	55
	Sedang	15	37.5
	Tinggi	3	7.5
Fasilitator	Rendah	35	87.5
	Sedang	5	12.5
	Tinggi	0	0
Dinamisator	Rendah	36	90
	Sedang	4	10
	Tinggi	0	0
Total	Rendah	35	87.5
	Sedang	5	12.5
	Tinggi	0	0

Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan dari jawaban dari responden yang diterima oleh peneliti mengenai pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator di wisata bahari Pantai Gope memiliki gambaran rentang jawaban seperti yang ada pada tabel 2. Indikator-indikator ini mengukur peran pemerintah dan dikategorikan rendah, sedang, dan tinggi sesuai dengan variabelnya masing-masing.

Dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator sangatlah penting. Menurut Pitana dan Gayatri (2005) dalam Adi *et al.* (2017), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan motivasi kepada berbagai stakeholders, seperti investor, masyarakat, dan pelaku usaha wisata, pada wisata bahari Pantai Gope, yaitu nelayan wisata dan pedagang, agar dapat memastikan keberlangsungan serta pertumbuhan sektor wisata. Bentuk motivasi tersebut dapat berupa promosi aktif, pemberian penghargaan, serta evaluasi berkala untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan. Peran pemerintah sebagai motivator dalam implementasinya oleh pihak pemerintah menurut persepsi masyarakat tergolong rendah dengan nilai persepsi tertinggi hanya 7,5%. Nilai ini pun sudah tergolong tertinggi dibandingkan dengan dua peran pemerintah lainnya, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator dan peran pemerintah sebagai dinamisator.

Promosi terhadap wisata Bahari Pantai Gope berdasarkan respons responden terdapat beberapa sudut pandang mengenai apakah pemerintah melakukan promosi terhadap wisata bahari Pantai Gope. Ada

responden yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak melakukan promosi dan ada juga yang menyebutkan bahwa pemerintah membantu dalam mempromosikan.

*“...Pemerintah kota dan provinsi sering melakukan promosi ke media sosial mengenai Pantai Gope, tetapi tidak ada pelatihan yang pernah dilakukan karena di bawah PPN...”* (M 35 Tahun, Nelayan Wisata).

*“...Promosi tempat pun dilakukan oleh pengunjung yang datang dan menyebarkan dari mulut ke mulut...”* (J 56 Tahun, Nelayan Wisata).

Namun, dari pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan Dinas Pariwisata Kota Serang sama-sama menjelaskan bahwa pihak pemerintah tidak melakukan promosi khusus terhadap wisata bahari Pantai Gope. Mengingat wisata bukan fokus dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan wisata bahari Pantai Gope bukan berada di bawah lahan pemerintah daerah, sehingga pernyataan mengenai tidak mempromosikan lebih sejalan dengan fakta yang dijelaskan dari pihak yang terkait. Mengenai promosi yang pernah dilakukan dari responden lain, terdapat kemungkinan bahwa promosi yang dilakukan terhadap Pantai Gope untuk promosi Desa Pancer yang berada di seberangnya bukan untuk daerah yang berada di bawah Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

*“...Promosi wisata di Pantai Gope terjadi melalui mulut ke mulut...”* (Pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu).

*“...Peran Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Serang terhadap perkembangan wisata bahari Pantai Gope dirasa tidak berhak untuk menyentuh, hanya memiliki peran untuk pencatatan kunjungan wisata untuk laporan banyaknya kunjungan wisata di Kota Serang...”* (Pihak Dinas Pariwisata Kota Serang).

*“...Peran pemerintah kelurahan hanya melihat dan mengawasi kegiatan di Pantai Gope...”* (Ketua Kelurahan Banten)

Hasil penelitian di kawasan wisata bahari Pantai Gope menunjukkan bahwa peran fasilitator pemerintah berada pada tingkat sedang. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam implementasinya oleh pihak pemerintah menurut persepsi masyarakat tergolong rendah dengan nilai persepsi tertinggi hanya 12,5% dalam tingkat sedang. Nilai ini pun sudah tergolong berada di peringkat kedua dibandingkan dengan dua peran pemerintah lainnya, yaitu peran pemerintah sebagai motivator dan peran pemerintah sebagai dinamisator dengan peran pemerintah sebagai motivator di posisi pertama.

Pemerintah telah memfasilitasi beberapa aspek seperti penyediaan infrastruktur dasar tetapi hanya sebatas secukupnya saja. Responden menyebutkan fasilitas terbentuk dari pembangunan awal jalan lalu bertambah dengan fasilitas lain dengan meningkatnya pengunjung yang datang. Fasilitas yang ada saat ini, seperti toilet, tempat parkir, tempat sampah, musahala, kedai pesisir, dan lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, yaitu:

*“... Sarana dan prasarana yang diberikan, seperti kedai makanan, tempat parkir gratis...”* (Kepala Tim Kerja Operasional Pelabuhan PPN Karangantu)

*“...Peran pemerintah terhadap perkembangan Pantai Gope, yaitu penataan dan menyediakan kedai pesisir dan menyediakan tempat parkir...Fasilitas yang disiapkan oleh PPN, seperti mushola dan toilet...”* (Pihak PPN Karangantu)

Peran pemerintah rendah dalam membantu sebagai jembatan antara komunitas dan pihak lain untuk mengembangkan wisata Bahari Pantai Gope. Sebab seperti yang dijelaskan sebelumnya, wisata bahari di Pantai Gope bukan menjadi fokus PPN Karangantu dan pemerintah lain tidak bisa mengambil alih karena bukan daerah mereka. Respons dari responden mengenai rapat bersama yang dilakukan oleh pemerintah pun bervariasi ada yang menyebutkan hampir setiap bulan, setiap tiga bulan sekali, setahun dua kali, setahun sekali, bahkan tidak pernah mengikuti rapat.

*“...Ohh, itu mah sering neng, mungkin setiap bulan ada kali...”* (L 46 Tahun, Pedagang)

*“...Paling buat nelayan wisata setahun sekali ada...”* (TK 32 Tahun, Nelayan Wisata)

*“...Belum pernah, kecuali paling nelayan yang perikanan...”* (E 41 Tahun, Nelayan Wisata)

*“...Ga pernah, itu mah paling nelayan aja. Penjual mah ga pernah...”* (A 52 Tahun, Pedagang)

Oleh karena itu, hasil penelitian mengenai kawasan wisata bahari Pantai Gope menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pengembangan pariwisata berada pada tingkat rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya intensitas pemerintah dalam menjalin kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat lokal. Tingkat keserangan pemerintah menjadi penghubung atau memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan juga sangat terbatas. Rendahnya peran ini berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat yang juga rendah, menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki pendekatan pemerintah dalam memfasilitasi sinergi antar pihak terkait.

### **Hubungan antara Tingkat Perkembangan CBT dengan Derajat Peran Pemerintah**

Secara keseluruhan, hasil analisis mengenai hubungan antara peran pemerintah terhadap pengembangan *community-based tourism* di wisata bahari Pantai Gope dengan menggunakan *rank spearman's* masih rendah atau belum ada. Hal ini sejalan dengan fakta di lapangan, bahwa pemerintah daerah tidak dapat bercampur tangan dengan situasi wisata bahari Pantai Gope karena lokasinya yang berada di dalam Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Sedangkan, pihak dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu juga kurang membantu dalam perkembangan wisata karena fungsi utama lahan tersebut bukan untuk wisata melainkan perikanan. Perkembangan wisata di Pantai Gope bukan menjadi fokus dan tugas utama pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara, sehingga tidak ada program dan dana khusus yang disiapkan untuk perkembangan wisata bahari Pantai Gope.

**Tabel 3.** Hasil uji hubungan dengan *rank spearman's* antara tingkat perkembangan CBT dengan derajat peran pemerintah di wisata bahari Pantai Gope

		Peran Pemerintah	Perkembangan CBT
Spearman's rho	Peran Pemerintah	Correlation Coefficient	1.000 .259
		Sig. (2-tailed)	.106
		N	40 40
Perkembangan CBT		Correlation Coefficient	.259 1.000
		Sig. (2-tailed)	.106 .
		N	40 40

Analisis menggunakan uji *rank spearman's* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara peran pemerintah terhadap aspek pengembangan CBT. Dari tabel 3 diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,106. Apabila nilai Sig. (2-tailed) 0,106, maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan hipotesis salah bahwa tidak terdapat hubungan antara peran pemerintah terhadap aspek pengembangan CBT di wisata bahari Pantai Gope. Nilai *correlation coefficient* dari tabel *rank spearman* yaitu, 0,259 memiliki makna bahwa nilai tersebut termasuk dalam hubungan yang rendah karena berada di antara 0,20-0,399.

Hubungan antara tingkat perkembangan CBT dengan derajat peran pemerintah yang rendah disebabkan oleh pemerintah daerah, seperti Dinas Pariwisata Kota Serang dan Kelurahan Banten, yang angkat tangan atau tidak ikut campur atas kegiatan yang ada di wisata bahari Pantai Gope. Hal ini disebabkan oleh lokasi wisata bahari Pantai Gope yang berada di lahan PPN Karangantu. Berdasarkan dari kepemilikan lahan, pihak yang berhak untuk mengatur kegiatan yang ada di wisata bahari Pantai Gope hanyalah PPN Karangantu.

Namun, hasil uji hubungan antara peran pemerintah dengan aspek pengembangan *community-based tourism* memiliki hasil yang berbeda antara kelompok nelayan dengan pedagang. Mengingat wisata bahari Pantai Gope berlokasi di dalam Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, maka pemerintah lebih memberikan fokusnya terhadap kelompok nelayan sehingga nelayan merasa pemerintah membantu dalam perkembangan. Maka, hasil uji hubungan dengan *rank spearman's* antara peran pemerintah dengan pengembangan CBT, yaitu terdapat hubungan untuk kelompok nelayan, tetapi tidak ada hubungan untuk kelompok pedagang.

Analisis menggunakan uji *rank spearman's* pada tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan peran pemerintah terhadap aspek pengembangan CBT bagi nelayan di wisata bahari Pantai Gope. Dari tabel 4 diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar

0.000. Apabila nilai Sig. (2-tailed) 0.00 dan nilai tersebut lebih rendah dari 0.05 maka hipotesis terbukti terdapat hubungan antara peran pemerintah terhadap aspek pengembangan CBT bagi nelayan di wisata bahari Pantai Gope. Nilai *correlation coefficient* dari tabel *rank spearman* yaitu, 0,809 memiliki makna bahwa nilai tersebut termasuk dalam hubungan yang sangat tinggi karena berada di antara 0,800-1,000.

**Tabel 4.** Hasil uji hubungan dengan *rank spearman's* antara tingkat perkembangan CBT dengan derajat peran pemerintah di wisata bahari Pantai Gope (nelayan)

		Peran Pemerintah (Nelayan)	Pengembangan CBT (Nelayan)
Spearman's rho	Peran Pemerintah (Nelayan)	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	14
Pengembangan CBT (Nelayan)		Correlation Coefficient	.809**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	14

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sedangkan hasil analisis menggunakan uji *rank spearman's* pada tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat tidak terdapat hubungan antara peran pemerintah terhadap aspek pengembangan CBT bagi pedagang di wisata bahari Pantai Gope. Dari tabel 5 diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.182. Apabila nilai Sig. (2-tailed) 0.182 dan nilai tersebut lebih besar dari 0.05 maka hipotesis salah dan tidak ada hubungan antara peran pemerintah terhadap aspek pengembangan CBT bagi pedagang di wisata bahari Pantai Gope. Nilai *correlation coefficient* dari tabel *rank spearman* yaitu, 0,276 memiliki makna bahwa nilai tersebut termasuk dalam hubungan yang sangat tinggi karena berada di antara 0,20-0,399.

**Tabel 5.** Hasil uji hubungan dengan *rank spearman's* antara tingkat perkembangan CBT dengan derajat peran pemerintah di wisata bahari Pantai Gope (pedagang)

	Peran Pemerintah (Pedagang)	Pengembangan CBT (Pedagang)
Spearman's rho	Peran Pemerintah (Pedagang)	Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N
Pengembangan CBT (Pedagang)		.276
		.182
		25

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai setiap peran pemerintah, yaitu peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Kemudian juga terkait hasil penelitian mengenai aspek perkembangan *community-based tourism* setiap dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Maka, pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan antara peran pemerintah dengan aspek perkembangan *community-based tourism* setiap dimensi disajikan sebagai berikut:

#### **Dimensi Sosial-Ekonomi**

Pemerintah memiliki peran untuk mengembangkan masyarakat dan komunitas di bawah dan sekitar kepemimpinannya. Namun, apakah pemerintah menjalankan perannya perlu diteliti. Pada bagian ini, peneliti meneliti hubungan peran pemerintah terhadap dimensi sosial-ekonomi. Dimensi sosial-ekonomi digabung karena kedua aspek ini saling bersangkutan satu dengan yang lainnya. Ketika interaksi meningkat, baik penjual dengan wisatawan, penjual dengan penjual, maupun wisatawan dengan wisatawan, hal ini menunjukkan meningkatnya jumlah wisatawan sehingga ekonomi dapat terpengaruh. Pada dimensi sosial ketika jumlah wisatawan banyak maka interaksi antara pedagang dan nelayan wisata dengan wisatawan maka semakin besar wisatawan untuk membeli produk atau jasa di tempat wisata.

Oleh karena itu, dimensi sosial dan ekonomi dapat saling terkait satu dengan yang lainnya. Pada wisata bahari Pantai Gope derajat peran pemerintah terhadap dimensi sosial-ekonomi dapat digambarkan pada tabel 6.

**Tabel 6.** Tabel silang peran pemerintah terhadap dimensi sosial-ekonomi

		Dimensi Sosial Ekonomi			<b>Total</b>
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah Rendah	Count (n)	4	27	3	34
	%	11.8%	79.4%	8.8%	100.0%
Sedang	Count (n)	2	1	1	4
	%	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
Tinggi	Count (n)	0	0	2	2
	%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Total	Count	6	28	6	40
	%	15.0%	70.0%	15.0%	100.0%

Berdasarkan dari tabel 6, pemerintah dapat terbilang rendah dalam membantu terhadap pengembangan CBT dari segi dimensi sosial-ekonomi. Namun, meskipun peran pemerintah rendah dalam pengembangan wisata bahari di Pantai Gope, dimensi sosial-ekonominya cukup berkembang. Data ini didukung oleh data masing-masing variabel peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Pada tabel 7 menggambarkan peran pemerintah sebagai motivator cukup dan dominan memiliki dampak terhadap dimensi sosial-ekonomi sedang. Hal ini disebabkan oleh responden yang merasa terbantu dari segi sosial dan ekonomi setelah adanya wisata bahari Pantai Gope.

Berdasarkan dari hasil nilai rata-rata secara berturut-turut perintkat pertama, kedua, dan ketiga, yaitu peran pemerintah sebagai motivator dalam dimensi sosial-ekonomi memiliki nilai rata-rata 20,3, peran pemerintah sebagai fasilitator dalam dimensi sosial-ekonomi memiliki nilai rata-rata 15, dan peran pemerintah sebagai dinamisator dalam dimensi sosial-ekonomi memiliki nilai rata-rata 14,6. Oleh karena itu, seperti yang data tunjukkan sebelumnya pemerintah saat ini lebih baik dalam menjalankan perannya sebagai motivator dibandingkan dengan fasilitator dan dinamisator. Hasil uji mengenai hubungan antara peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator dengan dimensi sosial-ekonomi dapat dilihat di tabel 8 dan tabel 9.

**Tabel 7.** Tabel silang peran pemerintah sebagai motivator terhadap dimensi sosial-ekonomi

		Dimensi Sosial-Ekonomi			<b>Total</b>
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah	Rendah	Count (n)	4	15	3
	%		18.2%	79.4%	13.6% 100.0%
Motivator	Sedang	Count (n)	2	13	0
	%		13.3%	86.7%	0.0% 100.0%
Tinggi	Count (n)	0	0	3	3
	%		0.0%	0.0%	100.0% 100.0%
Total	Count	6	28	6	40
	%	15.0%	70.0%	15.0%	100.0%

Tabel silang antara peran pemerintah sebagai motivator terhadap dimensi sosial-ekonomi ini tergolong sedang meskipun peran pemerintah tergolong rendah karena secara keseluruhan pemerintah membantu dalam mengembangkan, memotivasi, dan mendukung komunitas dalam dimensi sosial-ekonomi. Salah satu contohnya, yaitu pemerintah tidak membatasi atau melarang salah satu pihak atau pihak lainnya untuk berkegiatan di wisata bahari Pantai Gope selama kegiatan itu masih sesuai dengan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku.

Sedangkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator terhitung rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai motivator. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator memiliki perbedaan yang tipis, tetapi keduanya sama-sama memiliki peran yang rendah dengan dampak terhadap dimensi sosial-ekonomi yang sedang atau cukup, seperti yang tergambar pada tabel 29 dan tabel 30.

**Tabel 8.** Tabel silang peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap dimensi sosial-ekonomi

		Dimensi Sosial-Ekonomi			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	Rendah	Count (n)	6	26	3
		%	17.1%	74.3%	8.6% 100.0%
	Sedang	Count (n)	0	2	3
		%	13.3%	86.7%	0.0% 100.0%
	Tinggi	Count (n)	0	0	0
		%	0.0%	0.0%	0.0% 0.0%
Total		Count	6	28	6
		%	15.0%	70.0%	15.0% 100.0%

Tabel silang antara peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap dimensi sosial-ekonomi ini tergolong sedang meskipun peran pemerintah tergolong lebih rendah dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai motivator karena secara keseluruhan pemerintah membantu dalam perkembangan di wisata bahari Pantai Gope. Namun, peran pemerintah sangat minim terhadap pengaruhnya dalam perkembangan CBT di wisata bahari Pantai Gope. Salah satu yang dilakukan pemerintah dalam fasilitasi sosial-ekonomi, yaitu pemerintah, PPN Karangantu, yang membangun fasilitas yang ada di wisata bahari Pantai Gope. Sebagai dinamisator, pemerintah, PPN Karangantu, yang menentukan peraturan dan kebijakan yang ada di wisata bahari Pantai Gope

**Tabel 9.** Tabel silang peran pemerintah sebagai dinamisator terhadap dimensi sosial-ekonomi

		Dimensi Sosial-Ekonomi			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator	Rendah	Count (n)	4	28	4
		%	11.1%	77.8%	11.1% 100.0%
	Sedang	Count (n)	2	0	2
		%	50.0%	0.0%	50.0% 100.0%
	Tinggi	Count (n)	0	0	0
		%	0.0%	0.0%	0.0% 0.0%
Total		Count	6	28	6
		%	15.0%	70.0%	15.0% 100.0%

### Dimensi Budaya

Pada setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Meskipun begitu dalam pelestarian budaya tersebut dapat diperhatikan apakah pemerintah turut bercampur tangan dalam pelestarian budaya ini. Penelitian ini menanyakan apakah terdapat pelestarian budaya di wisata bahari Pantai Gope, apakah ada budaya baru yang masuk dari luar, bagaimana toleransi di wisata bahari pantai Gope, serta apakah membantu dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya yang ada. Berdasarkan data mengenai hubungan peran pemerintah dengan pengembangan *community-based tourism* terhadap dimensi budaya, pemerintah memiliki peran yang rendah, tetapi dimensi budaya pada kawasan wisata bahari Pantai Gope memiliki tingkat sedang, seperti yang digambarkan pada tabel 10.

**Tabel 10.** Tabel silang peran pemerintah terhadap dimensi budaya

		Dimensi Budaya			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah	Rendah	Count (n)	8	20	6
		%	23.5%	58.8%	17.6% 100.0%
	Sedang	Count (n)	0	4	0
		%	0.0%	100.0%	25.0% 100.0%
	Tinggi	Count (n)	0	0	2
		%	0.0%	0.0%	100.0% 100.0%
Total		Count	6	28	6
		%	15.0%	70.0%	15.0% 100.0%

Namun dalam tabel variabel lain yaitu tabel 11 mengenai peran pemerintah sebagai motivator terhadap dimensi budaya, dapat dilihat bahwa pemerintah membantu dalam memotivasi masyarakat bukan hanya dalam tingkat rendah tetapi sedang juga dengan hasil dari dampak tersebut pun cukup atau sedang dalam menjaga budayanya, seperti memberikan izin dalam menyelenggarakan pesta laut, memberikan pelatihan kerajinan tangan dari hasil laut seperti kerang, memberikan izin dalam penyelenggaraan silat, dan lainnya.

**Tabel 11.** Tabel silang peran pemerintah sebagai motivator terhadap dimensi budaya

		Dimensi Budaya			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah Rendah Sebagai Motivator	Count (n)	5	13	4	22
	%	22.7%	59.1%	18.2%	100.0%
	Sedang	3	10	2	15
	%	20.0%	66.7%	13.3%	100.0%
Tinggi	Count (n)	0	1	2	3
	%	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
	Total	8	24	8	40
	%	20.0%	60.0%	20.0%	100.0%

Tabel silang antara peran pemerintah sebagai motivator terhadap dimensi sosial-ekonomi ini tergolong sedang meskipun peran pemerintah tergolong rendah karena secara keseluruhan pemerintah membantu dalam mengembangkan, memotivasi, dan mendukung komunitas dalam dimensi budaya. Salah satu contohnya, yaitu pemerintah memberikan izin dalam kegiatan budaya yang akan diadakan di wisata bahari Pantai Gope, selama kegiatan budaya sesuai dengan peraturan yang ada dan mendapatkan izin dari pihak pemerintah.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan peran pemerintah sebagai motivator dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator terhadap dimensi budaya. Hasil dari tabel silang, mayoritas responden menjawab bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator sangat rendah meskipun dampak terhadap perkembangan dalam aspek dimensicukup baik, seperti yang digambarkan pada tabel 12 dan tabel 13.

Berdasarkan dari hasil nilai rata-rata secara berturut-turut perintkat pertama, kedua, dan ketiga, yaitu peran pemerintah sebagai motivator dalam dimensi budaya memiliki nilai rata-rata 20,3, peran pemerintah sebagai fasilitator dalam dimensi budaya memiliki nilai rata-rata 15, dan peran pemerintah sebagai dinamisator dalam dimensi budaya memiliki nilai rata-rata 14,6. Oleh karena itu, seperti yang data tunjukkan sebelumnya pemerintah saat ini lebih baik dalam menjalankan perannya sebagai motivator dibandingkan dengan fasilitator dan dinamisator. Hasil uji mengenai hubungan antara peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator dengan dimensi budaya dapat dilihat di tabel 12 dan tabel 13. Oleh karena itu, secara keseluruhan peran pemerintah dalam pengembangan *community-based tourism* dimensi budaya ternilai rendah.

**Tabel 12.** Tabel silang peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap dimensi budaya

		Dimensi Budaya			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	Rendah	Count (n)	8	21	35
		%	22.9%	60.0%	17.1% 100.0%
	Sedang	0	3	2	5
	%	00.0%	60.0%	40.0%	100.0%
Tinggi	Count (n)	0	0	0	0
		%	0.0%	0.0%	0.0% 100.0%
	Total	8	24	8	40
	%	20.0%	60.0%	20.0%	100.0%

Tabel silang antara peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap dimensi sosial-ekonomi ini tergolong sedang meskipun peran pemerintah tergolong lebih rendah dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai motivator karena secara keseluruhan pemerintah membantu dalam perkembangan di wisata

bahari Pantai Gope. Namun, peran pemerintah sangat minim terhadap pengaruhnya dalam perkembangan CBT di wisata bahari Pantai Gope. Salah satu yang dilakukan pemerintah dalam memfasilitasi dimensi, yaitu penyediaan lokasi penyelenggaran budaya di wisata bahari Pantai Gope. Sebagai dinamisator, pemerintah, PPN Karangantu, yang menentukan perizinan dan kebijakan mengenai kegiatan budaya yang diselenggarakan di wisata bahari Pantai Gope.

**Tabel 13.** Tabel silang peran pemerintah sebagai dinamisator terhadap dimensi budaya

			Dimensi Budaya			Total	
			Rendah	Sedang	Tinggi		
Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator	Rendah	Count (n)	8	22	6	36	
		%	22.2%	61.1%	16.7%	100.0%	
	Sedang	Count (n)	0	2	2	4	
		%	00.0%	50.0%	50.0%	100.0%	
	Tinggi	Count (n)	0	0	0	0	
		%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
Total		Count	8	24	8	40	
		%	20.0%	60.0%	20.0%	100.0%	

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan Community-Based Tourism (CBT) tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya intervensi pemerintah, tetapi oleh kemampuan masyarakat lokal dalam mengorganisir diri dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Namun demikian, peran pemerintah tetap krusial sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator untuk memastikan keberlanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan jejaring kemitraan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Pitana & Gayatri, 2005; Purnamasari, 2011).

### **Dimensi Lingkungan**

Kebersihan dan kenyamanan lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi alasan tujuan dari tempat wisata. Kebersihan lingkungan dalam suatu kawasan lingkungan dapat membuat tempat wisata lebih indah untuk dilihat. Namun, tidak jauh berbeda dengan dimensi dalam perkembangan *community-based tourism* lainnya, Peran pemerintah di wisata bahari Pantai Gope terbilang rendah, meskipun begitu masyarakat juga melihat dampak dalam perkembangan dari dimensi lingkungan karena adanya *community-based tourism* Pantai Gope.

**Tabel 14.** Tabel silang peran pemerintah terhadap dimensi lingkungan

			Dimensi Lingkungan			Total	
			Rendah	Sedang	Tinggi		
Peran Pemerintah	Rendah	Count (n)	0	27	7	34	
		%	0.0%	79.4%	20.6%	100.0%	
	Sedang	Count (n)	0	4	0	4	
		%	0.0%	100.0%	25.0%	100.0%	
	Tinggi	Count (n)	0	0	2	2	
		%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	
Total		Count	0	31	9	40	
		%	0.0%	77.5%	22.5%	100.0%	

Hasil data mengenai peran pemerintah ketika dilihat per variabelnya untuk perkembangan *community-based tourism* pada dimensi budaya, tidak jauh berbeda dengan hasil tabel silang antara peran pemerintah secara keseluruhan dengan dimensi lingkungan. Meskipun begitu, peran pemerintah sebagai motivator, tabel 15, memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator, tabel 16, dan dinamisator, tabel 17. Peran pemerintah sebagai motivator dinilai masih ada peran dalam tingkat sedang dengan dampak dimensi lingkungan yang memiliki nilai sedang juga.

**Tabel 15.** Tabel silang peran pemerintah sebagai motivator terhadap dimensi lingkungan

		Dimensi Lingkungan			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah Sebagai Motivator	Rendah	Count (n)	0	17	5
		%	0.0%	77.3%	22.7%
	Sedang	Count (n)	0	13	2
		%	0.0%	86.7%	13.3%
	Tinggi	Count (n)	0	1	2
		%	0.0%	33.3%	66.7%
Total		Count	0	31	9
		%	0.0%	77.5%	22.5%
					100.0%

Tabel silang antara peran pemerintah sebagai motivator terhadap dimensi lingkungan ini tergolong sedang dan peran pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan peran pemerintah dengan dimensi lain meskipun masih tergolong rendah. Secara keseluruhan pemerintah membantu dalam mengembangkan, memotivasi, dan mendukung komunitas dalam dimensi lingkungan. Pemerintah sangat menekankan kebersihan lingkungan dan mendorong masyarakat untuk membersihkan dan menjaga lingkungan di wisata bahari Pantai Gope karena apabila lingkungan kotor dapat mempengaruhi performa kapal. Sampah dapat masuk dalam mesin kapal sehingga dapat menghambat atau merusak kapal. Selain itu, lingkungan yang bersih juga dapat membuat wisatawan nyaman. Wisata bahari Pantai Gope pun berlokasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sehingga pihak PPN masih memerhatikan kebersihan yang berada di kawasannya.

Pada dimensi ini pemerintah menjalankan perannya sebagai motivator lebih baik dibandingkan dengan dimensi lainnya. Mengingat wilayah kawasan wisata bahari ini berada di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, maka kebersihan dan kenyamanan wilayah tetap diperhatikan. Selain itu, kebersihan laut juga perlu diperhatikan agar tidak menyangkut di motor kapal dan mengganggu ekosistem laut. Meskipun begitu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dari segi fasilitator dan dinamisator hasil data menunjukkan bahwa peran pemerintah terhadap dimensi lingkungan masih didominasi rendah tapi dengan hasil dampak pada dimensi lingkungan yang sedang atau cukup.

Berdasarkan dari hasil nilai rata-rata secara berturut-turut perintkat pertama, kedua, dan ketiga, yaitu peran pemerintah sebagai motivator dalam dimensi lingkungan memiliki nilai rata-rata 20,3, peran pemerintah sebagai fasilitator dalam dimensi lingkungan memiliki nilai rata-rata 15, dan peran pemerintah sebagai dinamisator dalam dimensi lingkungan memiliki nilai rata-rata 14,6. Oleh karena itu, seperti yang data tunjukkan sebelumnya pemerintah saat ini lebih baik dalam menjalankan perannya sebagai motivator dibandingkan dengan fasilitator dan dinamisator. Tabel silang antara peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap dimensi lingkungan ini tergolong sedang meskipun peran pemerintah tergolong lebih rendah dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai motivator karena secara keseluruhan pemerintah membantu dalam perkembangan di wisata bahari Pantai Gope. Hasil uji mengenai hubungan antara peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator dengan dimensi lingkungan dapat dilihat di tabel 16 dan tabel 17.

**Tabel 16.** Tabel silang peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap dimensi lingkungan

		Dimensi Lingkungan			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	Rendah	Count (n)	0	28	7
		%	0.0%	80.6%	19.4%
	Sedang	Count (n)	0	3	2
		%	0.0%	50.0%	50.0%
	Tinggi	Count (n)	0	0	0
		%	0.0%	0.0%	0.0%
Total		Count	0	31	2
		%	0.0%	77.5%	22.5%
					100.0%

Peran pemerintah sangat minim terhadap pengaruhnya dalam perkembangan CBT di wisata bahari Pantai Gope. Namun, beberapa contoh yang dilakukan pemerintah dalam memfasilitasi pada dimensi lingkungan, yaitu pemerintah, PPN Karangantu, menyediakan fasilitas kebersihan yang ada di wisata bahari Pantai Gope, seperti tempat sampah, toilet, dan pembersih kebersihan. Namun, pembersih kebersihan ini juga dibayar oleh masyarakat dengan membayar uang kas kebersihan. Sebagai dinamisator, pemerintah, PPN Karangantu, membantu menghubungkan dengan pihak lain untuk membersihkan dan mengembangkan penjagaan lingkungan.

**Tabel 17.** Tabel silang peran pemerintah sebagai dinamisator terhadap dimensi lingkungan

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator	Dimensi Lingkungan					Total
	Rendah	Count (n)	Rendah	Sedang	Tinggi	
	%		0.0%	80.6%	19.4%	100.0%
Sedang	Count (n)	0	2	2	4	100.0%
	%	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	
	Count (n)	0	0	0	0	
Tinggi	%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	Count	0	31	2	40	
	%	0.0%	77.5%	22.5%	100.0%	
Total						

### **Dimensi Politik**

Hal yang membedakan dimensi politik dengan dimensi lainnya, yaitu dimensi politik memiliki nilai dampak perkembangan secara keseluruhan yang lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Peran pemerintah dalam perkembangan dimensi politik sangat rendah sehingga berdasarkan data banyak yang menilai mengenai dampak perkembangan dimensi politik di wisata bahari Pantai Gope rendah. Meskipun, ada yang menilai peran pemerintah terhadap dimensi tinggi dan memberikan dampak yang tinggi. Tabel 18 menggambarkan bahwa peran pemerintah terhadap dimensi politik dinilai rendah.

**Tabel 18.** Tabel silang peran pemerintah terhadap dimensi politik

Peran Pemerintah	Dimensi Politik					Total
	Rendah	Count (n)	Rendah	Sedang	Tinggi	
	%		41.2%	58.8%	8.8%	100.0%
Sedang	Count (n)	1	3	0	0	100.0%
	%	25.0%	75.0%	100.0%	100.0%	
	Count (n)	0	0	2	2	
Tinggi	%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	Count	15	28	2	40	
	%	37.5%	57.5%	5.0%	100.0%	
Total						

Secara variabel peran pemerintah sebagai motivator pun lebih rendah dibandingkan dimensi yang lain. Pemerintah tidak memfokuskan mengenai pengembangan wisata bahari di Pantai Gope dan pemerintah lain tidak ada hak untuk menyentuh wilayah yang bukan dibawah kepemimpinannya. Oleh karena itu, perkembangan wisata bahari di Pantai Gope tidak didorong atau dimotivasi oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu untuk menghubungkan dengan pihak lain. Bahkan, keberadaan wisata ini faktanya berada di lokasi yang bukan seharusnya atau penyalahgunaan lahan tidak sesuai fungsinya.

Tabel silang antara peran pemerintah sebagai motivator terhadap dimensi politik ini tergolong sedang meskipun peran pemerintah tergolong rendah karena secara keseluruhan pemerintah membantu dalam mengembangkan, memotivasi, dan mendukung komunitas dalam dimensi politik. Dibandingkan dengan dimensi lain, dimensi politik merupakan dimensi terendah yang terendah dibandingkan dengan dimensi yang lain. Meskipun begitu peran pemerintah sebagai motivator dalam dimensi politik masih lebih baik dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator.

**Tabel 19.** Tabel silang peran pemerintah sebagai motivator terhadap dimensi politik

		Dimensi Politik			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah Rendah Sebagai Motivator	Count (n)	10	12	0	22
	%	45.5%	54.5%	0.0%	100.0%
	Sedang	5	10	0	15
	%	33.3%	66.7%	0.0%	100.0%
	Tinggi	0	1	2	3
	%	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
Total	Count	15	23	2	40
	%	37.5%	57.5%	5.0%	100.0%

Hasil data juga menilai peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator terhadap perkembangan dimensi politik dinilai rendah dengan dampak perkembangan dimensi politik juga rendah. Pemerintah tidak memotivasi, tidak memberikan wadah, dan tidak menghubungkan dengan pihak lain dalam dimensi politik. Sebagai fasilitator pemerintah membantu dalam menyediakan tempat untuk melakukan rapat untuk membahas perkembangan atau kebijakan di wisata bahari Pantai Gope, tetapi dari peran pemerintah sebagai dinamisator dalam bidang politik pemerintah tidak terlalu membantu.

**Tabel 20.** Tabel silang peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap dimensi politik

		Dimensi Politik			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	Rendah	Count (n)	15	20	0
	%		42.9%	57.1%	0.0% 100.0%
	Sedang	Count (n)	0	3	2
	%		0.0%	60.0%	40.0% 100.0%
	Tinggi	Count (n)	0	0	0
	%		0.0%	0.0%	0.0% 100.0%
Total	Count	15	23	2	40
	%	37.5%	57.5%	5.0%	100.0%

Berdasarkan dari hasil nilai rata-rata secara berturut-turut perintkat pertama, kedua, dan ketiga, yaitu peran pemerintah sebagai motivator dalam dimensi politik memiliki nilai rata-rata 20,3, peran pemerintah sebagai fasilitator dalam dimensi politik memiliki nilai rata-rata 15, dan peran pemerintah sebagai dinamisator dalam dimensi politik memiliki nilai rata-rata 14,6. Oleh karena itu, seperti yang data tunjukkan sebelumnya pemerintah saat ini lebih baik dalam menjalankan perannya sebagai motivator dibandingkan dengan fasilitator dan dinamisator. Hasil uji mengenai hubungan antara peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator dengan dimensi politik dapat dilihat di tabel 20 dan tabel 21.

**Tabel 21.** Tabel silang peran pemerintah sebagai dinamisator terhadap dimensi politik

		Dimensi Politik			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator	Rendah	Count (n)	14	22	0
	%		38.9%	61.1%	0.0% 100.0%
	Sedang	Count (n)	1	1	2
	%		25.0%	25.0%	50.0% 100.0%
	Tinggi	Count (n)	0	0	0
	%		0.0%	0.0%	0.0% 100.0%
Total	Count	15	23	2	40
	%	37.5%	57.5%	5.0%	100.0%

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Community-Based Tourism (CBT) di wisata bahari Pantai Gope lebih banyak dipengaruhi oleh inisiatif dan partisipasi komunitas lokal dibandingkan peran pemerintah. Pantai Gope berkembang secara alami sebagai destinasi wisata yang diinisiasi masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, sementara keterlibatan pemerintah daerah relatif terbatas karena keterbatasan kewenangan wilayah. Peran PPN Karangantu sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator juga masih rendah, sehingga secara umum tidak ditemukan hubungan signifikan antara tingkat perkembangan CBT dan peran pemerintah. Namun demikian, hubungan tersebut tetap terlihat pada komunitas nelayan, yang masih menjadi fokus perhatian PPN Karangantu. Meskipun demikian, Pantai Gope memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, PPN Karangantu, serta masyarakat lokal melalui kebijakan, program pendampingan, dan penguatan kelembagaan agar pengembangan CBT di Pantai Gope dapat berlangsung lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilani, T. L., Setiawina, N. D., Marhaeni, A. A. I. N., & Dewi, M. H. U. (2021). The influence of the role of the government and community participation on the development of the tourism industry and community welfare in Central Lombok District. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 1003–1013.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember 2023 mencapai 1,14 juta kunjungan, naik 20,17 persen (year-on-year)*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/01/2347/kunjungan-wisatawan-mancanegara-pada-desember-2023-mencapai-1-14-juta-kunjungan--naik-20-17-persen--year-on-year-.html>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.
- Dewi, P. S. W., Lilasari, L. N. T., & Saputra, I. G. G. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Wisata Paksebali di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*, 1(1), 52–62. <https://doi.org/10.52352/makardhi.v1i1.606>
- Dinas Kesehatan Kota Bandung. (2023). *Analisis tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah*. <https://dinkes.bandung.go.id/public-trust-analisis-tingkat-kepuasan-dan-kepercayaan-publik-terhadap-pemerintah/>
- Habiba, M., & Yeasmin, F. (2023). Community-based tourism (CBT): A community development tool. *European Journal of Business and Management*, 15(17), 1–9. <https://doi.org/10.7176/ejbm/15-17-01>
- Kecamatan Kasemen. (2024). *Gambaran umum Kecamatan Kasemen*. <https://kasemen.serangkota.go.id/pages/gambaran-umum>
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Andi.
- Purnamasari, R. (2011). Pengembangan masyarakat untuk pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional and City Planning*, 22(1), 1–14.
- Puspitaningrum, R., & Kuntari, E. D. (2021). Pengelolaan pariwisata bahari berbasis community-based tourism dalam peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. *Media Wisata*, 18(1), 1–20. <https://doi.org/10.36276/mws.v18i1.72>